

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pembangunan merupakan proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan, serta pengentasan kemiskinan. Pembangunan ekonomi memiliki tiga tujuan inti antara lain peningkatan ketersediaan serta perluasan distribusi berbagai barang kebutuhan hidup, peningkatan standar hidup (pendapatan, penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan perhatian atas nilai-nilai kultural dan kemanusiaan) dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial (Todaro, 2000).

Kependudukan dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat, jumlah penduduk menentukan efisiensi perekonomian dan kualitas dari tenaga kerja itu sendiri, karena akan menjadi sebuah kontribusi ataupun menjadi kendala dalam sebuah pertumbuhan ekonomi (Wara, 2016). Peningkatan jumlah penduduk membawa konsekuensi penambahan jumlah angkatan kerja. Angkatan kerja yang tumbuh lebih cepat daripada kesempatan kerja akan memperbesar jumlah pengangguran yang kemudian akan berdampak pada perekonomian bangsa. Semua memerlukan lebih banyak investasi, dan investasi berasal dari tabungan yang

disisihkan untuk kepentingan modal berproduktivitas. Bagi negara berkembang sangat sulit memiliki kapital karena unsur SDM semakin banyak dan tidak ada sumber produktivitas yang dilaksanakan sehingga tidak ada pendapatan, sumber tabungan pun tidak ada (Irawan dan Suparmoko, 2012). Menurut Suparmoko (1998) penyerapan tenaga kerja menjadi suatu hal yang teramat penting dalam peningkatan ekonomi secara agregat seperti pertumbuhan ekonomi, pertumbuhan ekonomi juga berpengaruh pada jumlah produksi barang dan jasa meningkat yang berpengaruh pada aktifnya perdagangan.

Faktor tingkat upah juga masuk ke dalam penelitian ini di karenakan tingkat upah dapat mempengaruhi orang untuk masuk atau tidak ke pasar tenaga kerja, dimana tingkat jika upah tinggi maka makin banyak masyarakat akan masuk ke dalam pasar tenaga kerja dan secara otomatis meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Selama ini masalah yang sering timbul dalam hal pengupahan adalah adanya perbedaan pengertian dan kepentingan mengenai upah antara pengusaha dan pekerja sehingga dalam hal ini diperlukan kebijakan pemerintah untuk mengatasi perbedaan kepentingan tersebut. Perbaikan upah berarti peningkatan pendapatan dan daya beli masyarakat. Peningkatan pendapatan masyarakat akan meningkatkan permintaan barang dan jasa yang kemudian pada gilirannya secara makro mendorong perusahaan untuk menambah produksi.

Selain upah faktor lain yang juga masuk ke dalam penelitian ini adalah investasi. Menurut Todaro (2000), bahwa kenaikan tingkat output dan kesempatan kerja dapat dilakukan dengan adanya akumulasi modal (investasi) dan tabungan. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif antara investasi dengan penyerapan tenaga kerja. Namun demikian, tidak selamanya adanya investasi dapat menyerap tenaga kerja, di negara-negara maju memiliki faktor produksi yang padat modal, sehingga investasi yang mereka tanamkan di negara berkembang cenderung padat modal.

Melihat dari uraian di atas, mengenai faktor-faktor yang diperkirakan akan mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), lalu bagaimana dengan kondisi tenaga kerja di negara Indonesia? Karena kondisi ketenagakerjaan sangatlah mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK).

Kondisi ketenagakerjaan di Indonesia dihadapkan dengan permasalahan yang cukup memprihatinkan ditandai dengan jumlah pengangguran yang cukup besar. BPS (Badan Pusat Statistik) menyebutkan angka pengangguran pada Agustus 2015 sebanyak 7,56 juta orang. Pada Agustus 2015, tingkat pengangguran terbuka menurut pendidikan didominasi oleh Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) 12,65 persen, Sekolah Menengah Atas (SMA) 10,32 persen, Diploma 7,54 persen, Sarjana 6,40 persen, Sekolah Menengah Pertama (SMP) 6,22 persen dan Sekolah Dasar (SD) ke bawah 2,74 persen. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah. Salah satu faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja adalah penyerapan tenaga kerja, seperti yang sudah di uraikan di atas bahwa tingkat penyerapan tenaga kerja di Indonesia rendah, lalu bagaimana dengan Tingkat

Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia mengingat dua hal tersebut saling berkaitan.

Di bawah ini merupakan tabel Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia.

Tabel 1.1

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Indonesia (%)

Tahun	TPAK
2006	66,16
2007	66,99
2008	67,18
2009	67,23
2010	67,72
2011	66,78
2012	67,76
2013	66,77
2014	66,60
2015	65,76

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat terlihat bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Indonesia secara umum dari tahun 2006-2015 mengalami fluktuasi atau naik turun. Dari tabel di atas terlihat Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja tertinggi di tahun 2007 dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja terendah di tahun 2015.

Seperti yang sudah di uraikan di atas bahwa penyerapan tenaga kerja di Indonesia terbilang rendah, namun demikian tidak semua wilayah di Indonesia tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah, di pulau Kalimantan BPS (Badan Pusat Statistik) mencatat bahwa penyerapan tenaga kerja di tahun 2015 naik 50 persen atau mencapai 208.850 tenaga kerja. Kontributor utama penyerapan tenaga kerja di pulau

Kalimantan adalah provinsi Kalimantan Timur, jumlahnya mencapai 91.055 tenaga kerja atau sekitar 43 persen dari total penyerapan tenaga kerja di Kalimantan. Di ikuti provinsi Kalimantan Barat dengan 47.001 tenaga kerja, Kalimantan Selatan 29.259 tenaga kerja, Kalimantan Tengah 26.331 dan Kalimantan Utara 15.204. Jumlah tenaga kerja yang terus meningkat menunjukkan bahwa tingkat usia produktif yang berkembang, serta jumlah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) masyarakat yang bergantung pada penyerapan tenaga kerja. Lalu bagaimana Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan?, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) di pulau Kalimantan akan terlihat dari tabel di bawah ini.

Tabel 1.2

Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Menurut Provinsi di Pulau Kalimantan (%)

Tahun	Provinsi			
	Kalimantan Barat	Kalimantan Tengah	Kalimantan Selatan	Kalimantan Timur
2006	73.71	72.37	70.43	67.27
2007	72.47	71.33	73.15	61.76
2008	73.66	71.24	71.35	64.31
2009	73.45	71.22	71.61	64.41
2010	73.17	69.86	71.26	66.41
2011	72.41	70.14	71.94	66.56
2012	71.4	69.88	71.95	66.37
2013	69.53	68.5	69.31	63.5
2014	69.93	68.56	69.46	64.1
2015	69.68	71.11	69.73	62.39

Sumber: www.bps.go.id

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006-2015 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan mengalami kenaikan dan penurunan.

Dari empat provinsi di pulau Kalimantan, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja yang paling tinggi di provinsi Kalimantan Barat dan yang paling rendah di provinsi Kalimantan Timur. Oleh karena itu pada penelitian ini yang menjadi sorotan penulis mengenai proses dari implikasi masalah kependudukan dan lapangan kerja menjadi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja. Dengan demikian, menurut penulis perlu kiranya dilakukan penelitian tentang Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dan merencanakan program pembangunan untuk meningkatkan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja dalam sebuah skripsi yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Di Pulau Kalimantan”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?
2. Bagaimana pengaruh upah terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?
3. Bagaimana pengaruh investasi dalam negeri terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?
4. Bagaimana pengaruh investasi luar negeri terhadap Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di pulau Kalimantan.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Sebagai bahan referensi bagi penelitian selanjutnya, tentang analisis faktor-faktor yang mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja .
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi pembuat kebijakan khususnya pemerintah Indonesia dalam menentukan arah dan strategi pembangunan di masa mendatang serta sebagai bahan evaluasi bagi perencanaan dalam mengantisipasi kondisi ketenagakerjaan nasional.